

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya antara pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan pajak kini dengan manajemen laba. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai teori yang akan digunakan seperti teori keagenan, teori akuntansi positif, serta pengertian dari laba, manajemen laba, pajak, aktiva pajak tangguhan, pajak tangguhan, dan pajak kini. Peneliti juga melampirkan bagan peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Agar bermanfaat, maka penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Telaah Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manager dan pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara agen (manajemen), principal (pemegang saham). Hubungan kontrak kerja sama tersebut berupa pemberian wewenang oleh principal kepada agen untuk bekerja demi pencapaian tujuan principal. Manager diangkat oleh pemilik untuk



menjalankan operasional perusahaan karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai pihak yang berwenang diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol (manajemen) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham). Teori keagenan terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Konflik kepentingan dalam perusahaan antara prinsipal dengan manajer yang disebut dengan *agency conflict* disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agency relationship*.

Agency conflict antara manajer dan pemegang saham ini dapat terjadi terutama jika perusahaan memiliki *excess cash flow* tersebut oleh manajer kecenderungannya akan digunakan untuk meningkatkan kekuasaannya melalui investasi yang berlebihan dan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan atau *excessive perquisites* (Sartono, 2001).

Agency conflict dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Sartono, 2001:97). Namun dengan munculnya pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya pengawasan (Monitoring Cost). *Monitoring cost* merupakan biaya untuk mengawasi perilaku agent apakah agent telah bertindak sesuai kepentingan principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer.

Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (principal) dengan pihak manajer



Has Cipta Diliindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



(agen) dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. yang sering disebut dengan biaya keagenan (*Agency Cost*).

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai manajemen laba (*earnings management*). Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan boleh berbeda dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Dengan adanya kebebasan itulah, maka manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) (Scott, 2000). Jadi, tindakan oportunistik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut. Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba.

Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986) Seperti yang sudah dijelaskan, dalam teori akuntansi positif ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Salah satu motivasi yang terkait dengan adanya target penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan selalu tidak pernah tercapai yaitu motivasi regulasi politik yang merupakan motivasi



manajemen dalam menyasati berbagai regulasi pemerintah guna melakukan manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan sehingga pajak yang dibayarkannya menjadi kecil.

3. Laba

a. Definisi Laba

Menurut Standart Akuntansi Keuangan (2015) laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurang beban pajak. Sedangkan menurut Ahmed Raihi Belkaoui (2004:480), laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya.

b. Tujuan Pelaporan Laba

Menurut Suwardjono (2008:157), laba yang diharapkan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan dalam tingkat pengembalian atas investasi atau (ROA)

- 1) Pengukuran prestasi atau kinerja suatu badan usaha dan manajemen
- 2) Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- 3) Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- 4) Dasar penentuan dan penilaian tarif dalam perusahaan publik
- 5) Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak hutang
- 6) Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- 7) Alat motivasi manajemen dalam pengendalian manajemen
- 8) Dasar pembagian dividen



c. Kualitas Laba

Menurut Richard, et al (2015:170) kualitas laba didefinisikan sebagai tingkat korelasi

antara laba akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonomi. Beberapa teknik yang bisa digunakan dalam menilai kualitas laba yaitu:

- 1) Membandingkan prinsip akuntansi yang umumnya digunakan dalam perusahaan industri
- 2) Meninjau perubahan prinsip akuntansi dan estimasi
- 3) Menentukan pengeluaran *discretionary* contoh: beban garansi yang tidak tercantum pada laporan laba rugi
- 4) Menilai biaya yang tidak terdapat dalam laporan laba rugi
- 5) Menentukan biaya penggantian persediaan dan aset lainnya
- 6) Melihat catatan laporan keuangan
- 7) Melihat pembahasan manajemen mengenai analisis dari laporan tahunan dan opini auditor
- 8) Menentukan pendapat manajemen untuk masa depan perusahaan dan mengidentifikasi masalah akuntansi utama

d. Karakteristik laba

Menurut Suwardjono (2010:456), laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut :

- 1) Kenalkan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasi suatu entitas.
- 2) Perubahan terjadi dalam kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir.
- 3) Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan
- 4) Selain itu, laba yang dilaporkan perusahaan digunakan oleh pihak luar seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:444), earnings management didefinisikan sebagai : *“Earnings Management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earnings objective.”*

Menurut Ahmed Raihi Belkaoui (2004:56), manajemen laba terjadi saat manajer menggunakan pertimbangannya dalam laporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan stakeholders mengenai presentasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil perjanjian yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penilaian. Definisi operasional manajemen laba adalah penggunaan manajemen akrual dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih cara alternatif dalam mencatat transaksi dan memiliki perlakuan akuntansi yang ditetapkan. Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk memperoleh manajer mengadaptasi keadaan ekonomi dan menggambarkan ekonomi berdasarkan transaksi secara tepat, dan juga digunakan untuk mempengaruhi tingkatan laba dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk melindungi laba untuk manajemen dan stakeholders.

b. Perspektif manajemen laba

Ada dua perspektif penting menurut Sulistyano (2008:10) yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perspektif informasi

Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan sebuah kebijakan manajerial untuk menggunakan harapan pribadi manajer mengenai arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Upaya mempengaruhi informasi

Hak cipta milik IBIKKG (Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada.

Kebebasan memilih metode akuntansi dan metode estimasi memicu seseorang untuk melakukan rekayasa laporan keuangan. Upaya rekayasa tersebut akan membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan bagi pemakainya. Informasi yang telah direkayasa akan mengakibatkan informasi keuangan tidak relevan, tidak netral, tidak lengkap, serta tidak mempunyai daya banding dan daya uji. Sementara kebutuhan dan kepentingan pihak lain atau disebut stakeholder untuk memperoleh informasi yang berkualitas menjadi terabaikan.

2) Perspektif oportunitis

Perspektif oportunitis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunitis manajemen untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibanding pihak lain. Perspektif ini dinilai sejalan dengan teori agensi karena seiring meningkatnya kesejahteraan pemilik, manajer dalam penguasaan informasi akan berlaku oportunitis. Upaya manajer untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi.

Perilaku oportunitis mengimplikasi upaya manajer dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada dirinya sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, earnings manajer dinilai sebagai cermin perilaku oportunitis seorang manajer dengan mempercantik laporan keuangan, yaitu laba atau kinerja perusahaan sesuai dengan kepentingannya.

Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat yang mendorong terjadinya manajemen laba. Artinya manajemen laba sebenarnya merupakan upaya oportunistis seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikan dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi sebenarnya.





c. Dampak manajemen laba

Sulistiyano (2008:23) mengungkapkan banyak dampak dari manajemen laba

diantaranya:

- 1) *Missallocation*, kekayaan perusahaan tidak dialokasikan dengan tepat.
- 2) Pemilik tidak memperoleh *return* sesuai dengan besarnya modal yang dicantumkan.
- 3) Kreditur keliru dalam menilai kemampuan perusahaan, sehingga dana yang dipinjamkan terancam tidak bisa dikendalikan.
- 4) Supplier keliru menilai kelayakan perusahaan sehingga kehilangan kesempatan. Untuk memperoleh *return* dari barang yang dikirim, bahkan dapat kehilangan barang-baarang yang telah diserahkan kepada perusahaan tersebut.
- 5) Regulator keliru dalam menilai kesehatan perusahaan sehingga membuat kebijakan yang tidak tepat untuk perusahaan yang bersangkutan.
- 6) Pemerintah tidak memperoleh hak yang seharusnya diterima dalam bentuk pajak sebagaimana mestinya.

d. Bentuk-bentuk manajemen laba:

Manajemen laba menurut Scoot (2015:447) dapat dilakukan dengan cara :

1) *Taking A Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2) *Income Minimization*

Dilakukan saat perusahaan mengalami tingkat probabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3) *Income Maximization*

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dilakukan saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4) *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba:

Menurut Watt dan Zimmerman (1986, diacu dalam Januarti, 2004) menyebutkan 3 (tiga) hal yang melatar belakangi terjadinya praktik manajemen laba, antara lain:

1) *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya, yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan earnings, lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2) *Debt Covenant Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit, cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

3) *Political Cost Hypothesis*

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi.



f. Model empiris manajemen laba

Menurut Ahmed Raihi Belkaoui (2004:456), model empiris yang digunakan untuk

mendeteksi earnings management adalah:

1) The Healey Model (1985)

Dalam model Healey, *discretionary accruals* adalah selisih antara nilai total akrual periode t yang dibagi dengan total aset periode sebelumnya dengan *nondiscretionary accruals*.

Nondiscretionary accruals merupakan total akrual yang dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya selama periode estimasi.

$$NDA_t = \frac{1}{N} \sum Y \frac{TACC_y}{A_{y-1}}$$

Keterangan:

NDA_t = *Nondiscretionary accruals*

N = banyaknya tahun dalam proyek estimasi

Y = tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi

$TACC_y$ = jumlah akrual

A_{y-1} = jumlah aset pada periode t-1

2) The De Angelo Model (1986)

Dalam model The De Angelo, *discretionary accruals* adalah selisih antara nilai total akrual periode t yang dibagi dengan total aset periode sebelumnya dengan *nondiscretionary accruals*. *Nondiscretionary accruals* diukur dengan menggunakan total akrual akhir periode yang dibagi dengan total aktiva akhir periode pada saat t-1.

$$NDA_t = \frac{TACC_{t-1}}{A_{t-2}}$$

Keterangan:

NDA_t = *Nondiscretionary accruals*

TACCt-1 = jumlah akrual akhir periode

At-2 = jumlah aset pada periode saat t-1

3) The Jones Model (1991)

Tujuan utama dari Model Jones adalah untuk mengontrol dapat perubahan dari keadaan perusahaan atas *Nondiscretionary accruals*. Sama seperti 2 model sebelumnya, *discretionary accruals* adalah selisih antara nilai total akrual periode t yang dibagi dengan total aset periode sebelumnya dengan *nondiscretionary accruals*. *Nondiscretionary accruals* dihitung dengan cara:

$$NDA_t = \beta_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta REV}{A_{t-1}} + \beta_3 \frac{PPE_1}{A_{t-1}}$$

Keterangan :

NDA_t = *Nondiscretionary accruals*

ΔREV = selisih revenue perusahaan pada periode t dengan revenue periode sebelumnya

(1)

PPE_t = nilai aset tetap (gross) perusahaan pada periode t

A_{t-1} = jumlah aset pada periode saat t-1

4) The Modified Jones Model

Merupakan modifikasi dari Model Jones. Model ini paling banyak digunakan karena paling baik dalam mendeteksi earnings management. Model ini didesain untuk mengeliminasi dugaan dari model Jones dalam mengatur *discretionary accruals* dengan kesalahan ketika kebijakan dipilih melalui pengakuan pendapatan.

Jumlah akrual dalam model ini merupakan selisih antara net income dengan cash flow from operation. *Discretionary accrual* adalah selisih antara nilai total akrual periode t yang





dibagi dengan total aset periode sebelumnya dengan *nondiscretionary accruals*.
nondiscretionary accruals dihitung dengan cara:

$$\frac{TACCT}{At-1} = \beta_1 \frac{1}{At-1} + \beta_2 \frac{\Delta REV}{At-1} + \beta_3 \frac{PPE1}{At-1} + e$$

Kemudian, koefisien regresi linier menghasilkan koefisien yang akan digunakan untuk menghitung *nondiscretionary accruals*.

$$NDA_t = \beta_1 \frac{1}{At-1} + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV - \Delta REC}{At-1} \right) + \beta_3 \frac{PPE1}{At-1}$$

Keterangan:

NDA_t = *Nondiscretionary accruals*

$TACCT$ = *total accruals*

ΔREV = selisih revenue perusahaan pada periode t dengan revenue periode sebelumnya (t-1)

ΔREC = selisih receivable perusahaan pada periode t dengan receivable pada periode sebelumnya (t-1)

PPE_t = nilai aset tetap (gross) perusahaan pada periode t

$At-1$ = jumlah aset pada perusahaan saat t-1

Kelebihannya model ini memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual yaitu discretionary current accrual, nondiscretionary current accrual, discretionary long term accrual, nondiscretionary long term accrual. Discretionary current accrual, dan nondiscretionary current accrual merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar, sedangkan discretionary long term accrual, dan nondiscretionary long term accrual merupakan akrual tidak lancar.



5. Pajak

a. Pengertian Pajak

(1) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip dari buku Waluyo (2013:2): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip dari buku Waluyo (2013:3): “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(3) Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:6), pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang berguna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk sumber pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :



(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, diperlukan memegang teguh asas-asas pemungutan sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan asas. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*”

dalam Waluyo (2013:13), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) Asas Keadilan (*Equality*)

1. Dilarang menyalin atau menjiplak isi buku ini tanpa izin IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) Asas Kemudahan (*Convenience*)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak (pada saat yang tepat bagi wajib pajak). Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

(4) Asas Ekonomi (*Economy*)

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

(2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *With Holding System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang (IAI, 2013). Besaran aktiva pajak tangguhan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Aktiva pajak tangguhan tidak dapat diakui jika timbul dari pengakuan awal aktiva atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi yang dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak (IAI, 2013). Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi.

7. Pajak Tangguhan

a. Definisi Pajak Tangguhan

Menurut DR.Drs.Mohammad Zain, AK (2005:179) efek pajak yang diakui pada saat diadakan dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Perbedaan antara PPh terhutang dengan beban pajak yang dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (*deffered tax*) naik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba laporan keuangan untuk kepentingan eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan pelaporan keuangan akuntansi lebih memberikan

keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak.

b. Metode alokasi pajak interperiode

Menurut Zain (2005: 190), metode alokasi pajak interperiode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1) Metode Penangguhan (*Deferred Method*)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Selisih jumlah Pajak Penghasilan Terhutang (berdasar SPT) dengan Biaya Pajak Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai Pajak yang Ditangguhkan. Jumlah Pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasar tarif pajak yang berlaku pada terjadinya transaksi yang menyebabkan terjadinya selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada terjadinya perbedaan tersebut.

2) Metode asset dan kewajiban (*asset-liability Approach*)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca yaitu perbedaan saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.

3) Metode Bersih dari Pajak (*Net-of-Tax Method*)





Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

c. Metode pajak tangguhan

Metode penangguhan pajak tangguhan, dengan berlakunya PSAK 46 timbul kewajiban perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method*. Untuk mengakui pajak tangguhan, PSAK 46 menggunakan metode asset-kewajiban yaitu:

1) Pendekatan Aktiva

Apabila pada tahun berjalan, nilai aktiva lebih besar daripada dasar pengenaan pajak akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang akan timbul kewajiban pajak yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai pajak tangguhan (*deffered tax*) pada tahun berjalan. Sebaliknya bila nilai aktiva lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

2) Pendekatan Kewajiban

Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat kewajiban lebih besar daripada dasar pengenaan pajak tercatat maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang boleh untuk dijadikan pengurang pajak. Pengurangan pajak tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) pada tahun berjalan. Sebaliknya bila nilai kewajiban tercatat lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak, maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Larangan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa pencahayaan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tahun merndatang akan timbul kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liability*) pada tahun berjalan.

8. Pajak Kini

a. Definisi pajak kini

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode PSAK 46 (2013:2). Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikaillkan dengan tarif pajak, kemudian dibayar serta dilaporkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuatu dengan peraturan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya terkait.

b. Pengelompokan pajak kini

Perbedaan ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu beda tetap/permanen (*permanent difference*) dan beda waktu sementara/temporer (*temporary difference*) sebagai berikut:

1) Beda Waktu

Perbedaan waktu adalah suatu perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi, sedangkan perbedaan tetap





adalah suatu perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban. Dimana adanya pendapatan dan

beban yang dapat ditunjukkan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan.

2) Beda tetap

Perbedaan yang bersifat pasti dan tetap karena antara prinsip akuntansi yang berlaku umum (SKA) dengan Undang-Undang PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Contoh masalah yang dapat menimbulkan beda tetap adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, misalnya deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, kenikmatan dan natura, sumbangan, dan pajak penghasilan yang telah dibayar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam penelitian:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti (2015)	Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan dan Basis Akrual Terhadap Manajemen Laba	<p>Variabel Independen : beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan akrual</p> <p>Variabel Dependen : Manajemen laba</p>	<p>(1)Beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba melalui pengujian signifikansi dengan nilai 0,042 atau lebih kecil dari 0,05</p> <p>(2)Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil signifikansi 0,107 atau lebih besar dari 0,05</p> <p>(3)Basis akrual tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai signifikansi 0,481 atau lebih besar dari 0,05</p>
2	Ni Putu Eka Wiastuti dan Elsa Chusniah (2011)	Analisa aktiva pajak tangguhan dan <i>discretionary accrual</i> sebagai prediktor manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI	<p>Variabel Independen : Aktiva pajak tangguhan dan discretionary accrual</p> <p>Variabel Dependen : Manajemen laba</p>	<p>(1)Aktiva pajak tangguhan dan discretionary accrual berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>(2)Aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya manajemen laba dengan tingkat signifikansi 5% dan akrual (hanya discretionary accrual) tidak berpengaruh.</p>
3	Budiman (2010)	Pengaruh beban pajak tangguhan, kini dan akrual terhadap indikasi adanya praktik manajemen	<p>Variabel Independen : Beban Pajak Tanggungan, kini, akrual</p> <p>Variabel Dependen : Manajemen Laba</p>	Beban pajak tangguhan,kini, dan akrual berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba.

© 2015 Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	<p>Ni Made Ayu Widiariani dan I Made Sukartha (2015)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi <i>Income Maximization</i></p>	<p>Variabel Independen : Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini</p> <p>Variabel Dependen : <i>Income Maximization</i></p>	<p>Aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh dalam mendeteksi <i>income maximization</i> saat <i>seasoned equity offerings</i> dengan nilai sig 0,704 lebih besar dari 0,05. Beban pajak kini dapat mendeteksi <i>income maximization</i> saat <i>seasoned equity offerings</i> dengan nilai sig 0,004.</p>
5	<p>Ardi Hamzah (2014)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Deteksi Manajemen Laba Melalui Beban Pajak Tangguhan, akrual Dan Arus Kas Operasi</p>	<p>Variabel Independen : Beban Pajak Tangguhan, akrual, dan arus kas</p> <p>Variabel Dependen : Manajemen Laba</p>	<p>(1) Beban pajak tangguhan berpengaruh dalam mendeteksi <i>earnings management</i> pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. (2) Akrual dan arus kas operasi tidak berpengaruh dalam mendeteksi <i>earnings management</i> pada saat menghindari pelaporan penurunan laba</p>
6	<p>Inasa Singkianti (2015)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba</p>	<p>Variabel Independen : Aktiva Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen : Manajemen Laba</p>	<p>Bahwa aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak tidak berpengaruh dalam menentukan manajemen laba</p>
7	<p>Aulia Rahmi (2013)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings</p>	<p>Variabel Independen: Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Beban pajak tangguhan dan beban pajak kini tidak dapat mendeteksi manajemen laba saat <i>seasoned equity offerings</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Andarumi Mustikaning Perwita, Titiek Puji Astuti (2014)	Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013	Variabel Independen : Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, AkruaI Variabel Dependen: Manajemen Laba	1. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 2. Aktiva pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 3. AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
9	Stella Mettawidya (2015)	Analisis Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012	Variabel Independen : Aset Pajak Tangguhan, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Manajemen Laba	1. Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan di perusahaan LQ 45 2. Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan di perusahaan LQ 45 3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan di perusahaan LQ 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10	Zulakha Suranggane (2007)	Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bej	Variabel Independen : Aktiva Pajak Tangguhan, akruaI Variabel Dependen : Manajemen Laba	1, Aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. AkruaI berpengaruh terhadap manajemen laba.
----	---------------------------	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

1. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Aktiva pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang (IAI, 2013). Besaran aktiva pajak tangguhan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Aktiva pajak tangguhan tidak dapat diakui jika timbul dari pengakuan awal aktiva atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bukan merupakan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi yang dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak (IAI, 2013).

Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aktiva pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara aktiva pajak tangguhan yang dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aktiva pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba. Hasil penelitian Andarumi (2014) menunjukkan bahwa perencanaan aktiva pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Ha₁ : Aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan komponen dari total beban pajak penghasilan perusahaan dan mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang dihitung sebagai dasar perhitungan pajak) yang muncul dari akibat item-item pendapatan dan beban yang mempengaruhi laba baik secara akuntansi maupun fiskal, tetapi dalam periode yang berbeda. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan digunakan untuk memprediksi manajemen laba dalam menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian Zulaikha (2007:84).

Beban pajak yang tinggi menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya dibanding pelaporan pajaknya. Oleh



karena itu beban pajak tangguhan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan *earnings management* dengan meningkatkan laba (income maximazition) dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian. Sebaliknya beban pajak negatif atau manfaat pajak tangguhan menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan, perusahaan mengakui biaya lebih awal atau menanggihkan pendapatan dibanding pelaporan pajaknya. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan *earnings management* dengan menurunkan laba dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2014:12) penelitian ini menunjukkan hasil beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adanya indikasi praktek manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ha₂ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba

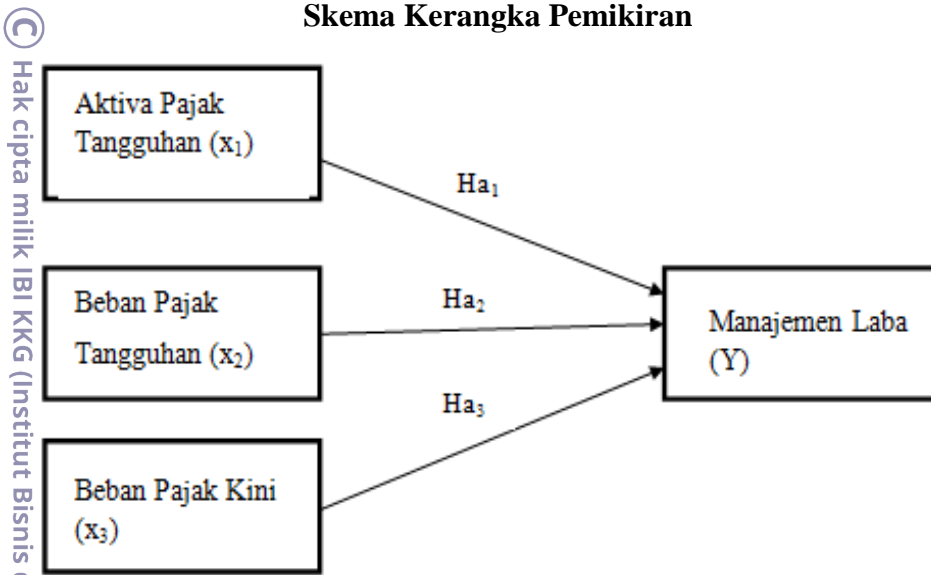
Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan kena pajak satu periode. Besarnya didapat dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap dan beda waktu yang dikalikan dengan tarif pajak berlaku. Karena perbedaan antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak merefleksikan efek dari perbedaan tersebut digunakan sebagai variabel independen dalam mendeteksi manajemen laba. Menurut hasil penelitian Felicia Amanda dan Meiriska Febianti (2015) menyimpulkan bahwa beban pajak kini mampu digunakan sebagai prediktor atau dapat memprediksi manajemen laba.

Ha₃ : Beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba.



Gambar 2. 1

Skema Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- Ha₁ : Aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
- Ha₂ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
- Ha₃: Beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.